

Buletin

Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas



SISTEM RESI GUDANG: CITA-CITA YANG SELALU DIGAPAI

MALANG MELINTANG
DI DAGLU BERLABUH
JUGA DI BAPPEBTI

HARI KONSUMEN NASIONAL:
UPAYA MELAYANI
SANG RAJA

LESSONS FROM JAPAN:
A STORY ABOUT IATSS
FORUM LEADERSHIP
TRAINING

EDISI **196**

BAPPEBTI/MJL/196/XVII/2018/EDISI APRIL

PENANGANAN PENGADUAN & PROSES PENEGAKAN HUKUM (UU 32/1997 & PP 10/1999)

PERKA 125



PERKA 11 - 13



DAFTAR ISI

PASAR LELANG

Beberapa Catatan Pelaksanaan Lelang GKR

10

PERDAGANGAN BERJANGKA

Upaya Wujudkan Mimpi Indonesia Sebagai Acuan Harga Timah Dunia

12

AGENDA FOTO

14

AKTUALITA

18

- Permintaan Timah Dan Nikel Dunia Naik
- Indonesia-Jepang Targetkan Penyelesaian General Review IJEPA Pada Akhir 2018
- Gelar Klinik Produk Ekspor Teh Untuk Tingkatkan Daya Saing
- Dalam Tempo Tiga Bulan Harga Emas Antam Naik RP 15.000
- Emas Dunia Naik Lagi Karena Pernyataan Trump Soal Tambahan Tarif Terhadap China
- Harga CPO Sulit Menanjak Pada Kuartal II-2018
- Ramadhan Jadi Salah Satu Harapan CPO
- Mutu Garam Membaik, Harga Pun Melonjak

ENGLISH CORNER

22

INFO HARGA

25

KOLOM

26

KOMIKITA

30

BERITA UTAMA

Sistem Resi Gudang: Cita-Cita Yang Selalu Digapai



DARI LAPANGAN

Lessons from Japan: A story about IATSS Forum Leadership Training



KIPRAH

Malang Melintang di Daglu Berlabuh Juga di Bappebti



Buletin
Bappebti
Mengabdikan Dengan Integritas

Penerbit
Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi

Penanggung Jawab
Bachrul Chairi

Redaktur
Nusa Eka

Penyunting / Editor
Diah Sandita Arisanti
Muhammad Rivai Abbas
Apriliyanto

Fotografer
Fitriana Hasnan
Leli Wulandari

Sekretaris
Yudi Ahmad Wahyudi

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat

Redaksi menerima artikel ataupun opini dikirim lengkap dengan identitas serta foto ke E-mail : humas.bappebti@kemendag.go.id

www.bappebti.go.id

f Bappebti Kementerian Perdagangan
@InfoBappebti
@Bappebti



Sistem Resi Gudang: Cita-Cita Yang Selalu Digapai

Pada awalnya Sistem Resi Gudang masih terbatas menerima 8 jenis komoditi. Karena dirasakan manfaatnya kini berkembang menjadi 17 jenis komoditi, tidak hanya komoditi pangan tetapi juga komoditi bahan industri

Dari dulu kita kerap kali mendengar jika musim panen tiba maka harga hasil pertanian anjlok. Para petani tidak bisa menahan komoditi pertaniannya lebih lama, karena mereka membutuhkan uang untuk modal menanam kembali. Akhirnya, di bawah tekanan harga hasil panennya dilepas juga. Petani pun bisa bernapas agak lega karena bisa memulai kembali bekerja.

Masalahnya, apa yang diperoleh petani karena menjual dengan harga seadanya membuat pendapatan yang diperolehnya tidak sesuai harapan. Akibatnya kehidupan petani berputar di situ-situ saja karena tidak ada peningkatan kesejahteraan. Inilah yang menjadi keprihatinan pemerintah

yang kemudian menggulirkan Sistem Resi Gudang sebagai solusi mengatasi masalah jatuhnya harga komoditi pada saat panen.

Sistem Resi Gudang (SRG) di Indonesia berlaku pertama kali dengan ditetapkannya UU No. 9 tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang yang kemudian diubah dengan UU no. 9 tahun 2011. "Pada awalnya SRG meliputi 8 jenis komoditi yakni gabah, beras, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut dan jagung. Kini komoditi resi gudang makin berkembang," ujar Retno Rukmawati, Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditas.

Retno menjelaskan Sistem Resi Gudang (SRG) merupakan instrumen

perdagangan maupun keuangan yang memungkinkan komoditi yang disimpan dalam gudang memperoleh pembiayaan dari lembaga keuangan tanpa diperlukan adanya jaminan lainnya. Jaminan yang diagunkan cukup berupa komoditi yang disimpan di gudang SRG. Cara ini sangat menolong petani yang pada umumnya tidak memiliki jaminan atau kolateral untuk bisa memperoleh kredit dari bank. "Namun untuk itu komoditi yang disimpan di gudang SRG tentu harus memenuhi standar kualitas tertentu, sehingga nilai komoditi tersebut bisa dipertanggungjawabkan. Lembaga yang memberikan penilaian juga harus lembaga yang kompeten dan terakreditasi," kata Retno.

Retno menambahkan komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG ditetapkan melalui Peraturan Menteri Perdagangan dengan mempertimbangkan beberapa persyaratan berikut :

- Memiliki daya simpan paling sedikit 3 [tiga] bulan
- Memenuhi standar mutu tertentu
- Jumlah minimum barang yang disimpan

Hingga saat ini, berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 37/M-DAG/PER/11/2011 tentang Barang yang dapat disimpan di Gudang dalam Penyelenggaraan Sistem Resi Gudang, komoditi yang dapat disimpan di gudang SRG berjumlah 17 jenis, antara lain gabah, beras, jagung, kopi, kakao, lada, karet, rumput laut, rotan, garam, gambir, teh, kopra, timah, bawang merah, ikan, dan pala.

Keragaman komoditi yang dimiliki Indonesia merupakan potensi yang luar biasa untuk pengembangan SRG. Karena itu ke depannya potensi pengembangan SRG sangat terbuka lebar. Hal ini juga terlihat dari terus berkembangnya jenis-jenis komoditi yang bisa dimasukkan ke dalam SRG. Penetapan selanjutnya tentang Barang dalam SRG dilakukan oleh Kementerian Perdagangan dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Pemerintah Daerah, instansi terkait atau asosiasi komoditi.

SRG Bangun Sumberdaya Lokal

Selain menjadi kolateral atas pinjaman modal yang dipinjam, sistem Resi Gudang juga diterapkan sebagai cara untuk tunda jual. Jadi, tidak mesti petani yang menyimpan komoditinya di gudang SRG untuk meminjam modal, tapi sebenarnya bisa juga mereka hanya menyimpan hasil panennya untuk kemudian dijual pada saat harganya dianggap sudah cukup menguntungkan. Dalam hal ini,



petani akan dikenakan sewa gudang dan petani tinggal menghitung-hitung berapa kemungkinan ia bisa memperoleh kenaikan harga dengan menunda penjualan hasil panennya.

Seiring perkembangannya ternyata Sistem Resi Gudang (SRG) tidak hanya sarana tunda jual dan kolateral kredit bagi para petani, tapi SRG juga berpotensi juga memberikan kontribusi yang signifikan bagi tujuan pembangunan sektor industri dan perdagangan yang berbasis sumber daya lokal. Sebab inovasi dalam pelaksanaan SRG terus bergulir. Jenis-jenis komoditi yang dilayani dalam sistem ini juga semakin luas dan tingkat pemahaman masyarakat, khususnya petani, tentang SRG juga semakin meningkat.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan suatu mekanisme yang meningkatkan akses pasar, ketersediaan informasi mengenai stok dan mutu komoditi kepada semua yang aktif dalam sektor komoditi [termasuk informasi harga], meningkatkan kepercayaan terhadap standar mutu, memberikan keamanan yang lebih besar dalam transaksi perdagangan, mempermudah dalam memperoleh pembiayaan komoditi yang kompetitif dan memungkinkan transfer risiko harga yang lebih efektif dan transparan.

Guna mewujudkan hal tersebut program kerja dan kebijakan terkait SRG yang ditetapkan oleh Bappebti

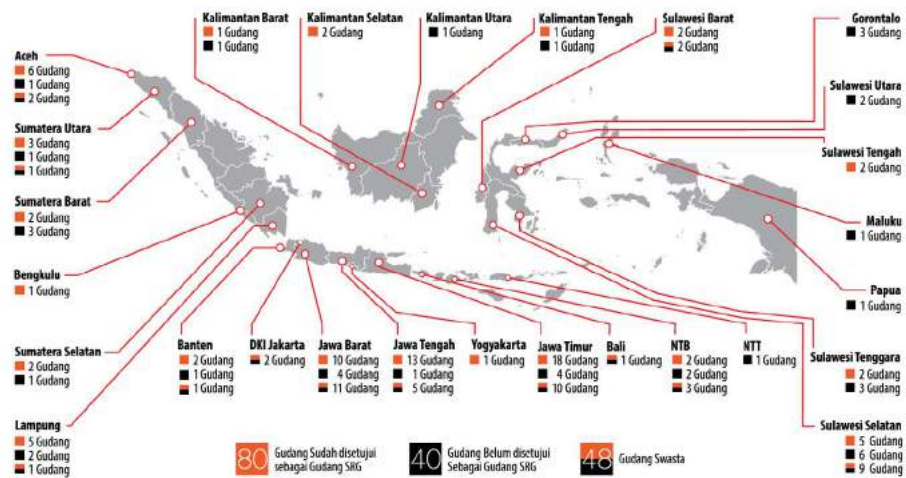
diarahkan untuk meningkatkan daya saing komoditi SRG dan memperbaharui manajemen stok pangan nasional, dan pada akhirnya kesejahteraan masyarakat di sektor perdagangan komoditi akan meningkat.

Kendala SRG

Menyimak konsep Sistem Resi Gudang hampir setiap orang yang mendengarnya selalu mengatakan bahwa sistem ini sangat baik untuk mendongkrak kesejahteraan petani. Apalagi pemerintah juga memberikan subsidi atas kredit bank yang ditanggung petani jika komoditinya dimasukkan dalam gudang SRG. Namun demikian tak ada upaya yang langsung berjalan mulus. Dalam pelaksanaannya Sistem Resi Gudang di beberapa daerah menghadapi berbagai kendala dan rintangan yang harus selalu dicari jalan keluarnya.

"Melihat kondisi saat ini, harus kita akui bahwa kelembagaan pengelola gudang SRG di daerah masih sangat terbatas, sehingga pada gilirannya berdampak pada lambatnya pertumbuhan pelaksanaan SRG secara nasional. Berdasarkan hasil evaluasi kami, kondisi tersebut disebabkan oleh sulitnya menemukan koperasi/BUMD di daerah yang memiliki SDM yang terampil dalam pengelolaan gudang dan komoditas, khususnya komoditas pertanian," ujar Kepala Bappebti, Bachrul Chairi.

PERKEMBANGAN SISTEM RESI GUDANG



Pada tahun 2018 ini Bappebti menerangkan bahwa pemerintah telah membangun 121 gudang komoditi pertanian, namun baru 90 yang telah memiliki kelengkapan untuk mendapatkan persetujuan [antara lain sertifikasi, peralatan pendukung] sebagai Gudang SRG. Sementara 31 gudang lainnya masih belum aktif. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Biro Pengawasan Sistem Resi Gudang dan Pasar Lelang Komoditi Bappebti mencatat beberapa tantangan yang cukup signifikan yang menyebabkan 31 gudang masih belum mengimplementasikan SRG, yaitu:

- a. **Kurangnya komitmen Pemda terhadap keberlanjutan SRG.**
- Pejabat Daerah seringkali mengalami mutasi, sehingga penyiapan SRG terhenti di tengah jalan. Hal ini menyebabkan terhambatnya penyiapan pelaksanaan SRG meliputi dukungan APBD [operasional, pendampingan calon pengelola gudang, kelengkapan gudang sesuai SNl, dan sertifikasi kelayakan gudang SRG], sosialisasi, dan koordinasi lintas Satuan Kerja Perangkat Daerah [SKPD] terkait.
- Masih terbatasnya peran pemda

melalui APBD yang memberikan subsidi bagi petani pada awal pelaksanaan SRG sebagai stimulan untuk mendorong minat petani menyimpan komoditasnya di gudang SRG. Bentuk subsidi yang diperlukan dalam proses penerbitan resi gudang antara lain biaya uji mutu, asuransi, penyimpanan barang, ongkos transportasi dan bongkar muat.
- Sebagian besar gudang yang dibangun oleh pemerintah pada tahun 2009 hingga 2010 telah dihibahkan ke daerah dan untuk gudang yang dibangun tahun 2011 sampai 2016 dibiayai melalui Dana Alokasi Khusus [DAK], sehingga gudang tersebut telah sepenuhnya menjadi milik daerah. Namun demikian, masih banyak Pemda yang belum mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan dan optimalisasi pemanfaatan gudang SRG tersebut.

- b. **Kelengkapan prasarana dan sarana gudang**
Agar pelaksanaan SRG dapat memberikan nilai tambah bagi petani dan mengurangi keterikatan petani pada tengkulak/pengijon, maka fasilitas gudang SRG yang ada saat ini perlu ditingkatkan, sehingga gudang

SAAT INI PEMERINTAH SUDAH MEMBANGUN 121 GUDANG SRG DI BERBAGAI DAERAH DI INDONESIA. NAMUN SEBANYAK 31 GUDANG DIANTARANYA MASIH BELUM BERJALAN KARENA BEBERAPA KENDALA

memiliki mesin pengering [dryer], mesin pengolahan komoditi [RMU untuk gabah, alat pengolah untuk kopi, kakao dan rumput laut] dan juga sarana transportasi. Keberadaan sarana ini akan menciptakan Gudang SRG tidak hanya sebagai sarana penyimpanan komoditi, melainkan juga sebagai sarana pemberi nilai tambah komoditi dengan biaya yang ekonomis.

- c. **Tidak adanya lembaga SRG di lokasi gudang yang dibangun pemerintah**
Lokasi gudang berada di sentra produksi yang jauh dari perkotaan sehingga tidak terdapat Pengelola Gudang atau Lembaga Penguji Mutu yang telah memperoleh persetujuan di daerah tersebut. Kalaupun ada, calon Pengelola Gudang atau Lembaga Penguji Mutu di daerah tersebut memiliki keterbatasan modal maupun kemampuan/keahlian.

- d. **Kualitas hasil panen belum memenuhi standar SRG**
Persyaratan pemenuhan terhadap standar mutu tertentu seringkali sulit dipenuhi oleh para petani. Hal ini disebabkan pola budidaya yang belum berorientasi pada kualitas, maupun



terbatasnya peralatan pengolahan pasca panen yang dimiliki petani, termasuk diantaranya adalah mesin pengering.

- e. **Keterbatasan akses pemasaran komoditi**
Pasar menjadi muara pada pelaksanaan SRG. Namun pada kenyataannya petani masih sulit untuk mengakses secara langsung pasar komoditi yang ada. Petani terbiasa dengan peran perantara sehingga harga yang diperoleh tidak maksimal. Untuk itu fungsi Pasar Lelang Komoditi [PLK] perlu disinergikan dengan SRG.
- f. **Kurangnya dukungan lembaga keuangan**
Sampai saat ini, lembaga keuangan bank/nonbank masih belum tertarik dan ragu untuk menyalurkan pembiayaan melalui skema SRG karena belum adanya kepercayaan perbankan terhadap sistem ini. Kondisi ini pada akhirnya menyebabkan kurangnya minat pelaku usaha memanfaatkan SRG sebagai instrumen untuk mendapatkan pembiayaan.
- g. **Belum optimalnya sinergi kebijakan**
Keberhasilan pelaksanaan SRG tidak lepas dari dukungan para *stakeholders* terkait baik Kementerian/ Lembaga terkait, pemda, sektor swasta serta pelaku SRG. Keberhasilan SRG tersebut ditentukan pula dari sinergi penanganan komoditi mulai

dari prapanen, panen sampai dengan pasca panen sehingga diperlukan sinergi dari para *stakeholders* terkait. Namun demikian, sampai dengan saat ini kebijakan atau program K/L, Pemda dan sektor swasta masih belum sinkron dalam kaitan penempatan bantuan fisik dan non fisik di daerah guna mendukung pelaksanaan SRG.

- h. **Belum optimalnya peran BUMN/ BUMD**
Dalam pelaksanaan SRG, BUMN/ BUMD memiliki peran yang cukup strategis dimana mereka dapat berperan menjadi pengelola gudang sekaligus berperan sebagai *standby buyer* maupun agen pemasaran komoditi, sehingga diharapkan dapat meningkatkan minat pelaku usaha untuk memanfaatkan SRG dalam mendapatkan keuntungan yang lebih besar.

Catatan Bappebti tersebut diperkuat oleh kajian yang dilakukan oleh Bank Indonesia. Seperti diungkapkan dalam “Kajian Peningkatan Sistem Resi Gudang” tahun 2017 Bank Indonesia menyebutkan implementasi SRG dinilai belum cukup optimal. Kendala utamanya antara lain, kurangnya pemahaman tentang SRG dan manfaatnya bagi pelaku usaha [petani, poktan, gapoktan, koperasi, dll], besarnya biaya penyimpanan di gudang SRG, serta perbankan yang memilih alternatif skema pembiayaan lain

yang dianggap lebih menguntungkan misalnya kredit komersial.
Untuk mendapatkan solusi dari permasalahan implementasi SRG tersebut, Bank Indonesia menyatakan perlunya program terstruktur yang menjadi komitmen dari seluruh pelaku/ stakeholder SRG [petani, poktan, gapoktan, koperasi, Bappebti, pengelola gudang, Pemda, Kementerian/ Lembaga terkait, perbankan, dan Bank Indonesia], dengan tujuan utama untuk meningkatkan pemanfaatan SRG di Indonesia.
Bappebti sendiri terus melakukan berbagai perbaikan dan inovasi agar pelaksanaan SRG ini dapat memberikan manfaat yang lebih besar lagi, antarlain meningkatkan kapasitas kelembagaan dan sumberdaya manusianya. Seperti diungkapkan Retno Rukmawati, secara sistem Bappebti juga mengadopsi teknologi informasi dengan menerapkan sistem online pada SRG, serta mengintegrasikan Sistem Resi Gudang dengan Pasar Lelang Komoditi agar akses pasar komoditi yang dihasilkan terbuka lebih lebar. “Kami juga menerapkan konsep *Double Track Strategy* dimana SRG tidak hanya difokuskan pada penerbitan Resi Gudang untuk menunjang komoditi yang menunjang ketahanan pangan seperti gabah, beras dan jagung, tapi SRG juga menunjang komoditi industri dan ekspor seperti kopi, rumput laut, kakao, rotan, lada,” ujar Retno.

Belajar SRG Dari India

Seperti halnya Indonesia, India juga menerapkan Sistem Resi Gudang. Pertumbuhannya jauh lebih cepat dengan jumlah gudang mencapai 1.152 gudang SRG. Indonesia pun melihat perkembangan SRG di sana



Sejak diperkenalkannya sistem resi gudang [SRG] yang dapat dimanfaatkan sebagai instrumen pembiayaan bagi para petani di India pada tahun 2010, jumlah kredit yang dikeluarkan setiap tahun dengan resi gudang sebagai jaminannya telah meningkat dengan mantap di negeri Bollywood tersebut. Saat ini pendapatan resi gudang tahunan India diperkirakan sebesar INR 35.000 crore [USD 5,4 miliar atau sekitar Rp. 75 triliun] per tahun atau sekitar Rp. 6,3 triliun per bulannya. Pendapatan tersebut diproyeksikan terus meningkat. Pada tahun 2020 diperkirakan pertumbuhan pendapatan dari SRG di India mencapai INR 1 lakh crore [USD 15 miliar] atau sekitar Rp. 225 triliun atau sekitar Rp. 19 triliun per bulannya. Jumlah

yang sangat besar.

Dari sudut pandang petani, pengolah dan pedagang, ketersediaan kredit dari sektor yang terorganisir melalui SRG ini tentu sangat menarik. Dan ini bisa mencegah terjadinya penjualan komoditi oleh petani dengan harga yang menyedihkan.

Sebagian besar dari inisiatif ini terkait dengan organisasi dan standar sertifikasi yang telah ditetapkan sebagai bagian dari Undang-Undang Pengembangan dan Peraturan Pergudangan [WDRA - Warehouse Development dan Regulation Act] di India. Saat ini terdapat 1.152 gudang di seluruh India yang disertifikasi untuk mengeluarkan resi gudang. Dalam bentuknya saat ini, WDRA dan tanda terima yang dapat dinegosiasikan disiapkan untuk 'barang kering' -

komoditi yang diproduksi dan diperdagangkan dalam volume besar seperti biji-bijian, lentil [semacam kacang-kacangan] dan staples tahan lama yang dipilih seperti kentang dan cabe.

Pertumbuhan SRG di India menggembirakan. Jumlah gudang penyimpanan yang berkualitas baik di telah berkembang dalam beberapa dekade terakhir, namun pertumbuhannya tidak cukup cepat untuk memenuhi permintaan. Karena itu tidak mengherankan jika Indonesia juga melakukan studi banding untuk melihat bagaimana Sistem Resi Gudang dijalankan di negara yang penduduknya sekitar 1,3 milyar jiwa ini. Bappebti dan juga Jamkrindo pernah melakukan kunjungan studi banding tentang SRG ini tahun 2016 lalu.

Industri pergudangan dan logistik padat modal di India telah melihat lebih peluang besar dalam bisnis bidang SRG ini. Pemerintah juga mendorong percepatan konsolidasi, mengarah ke gudang yang lebih standar, lebih besar, terpusat dengan pengaturan standar kualitas. Perkembangan positif tersebut dikombinasikan dengan rencana pemerintah untuk menghubungkan informasi pergudangan secara digital, membuat disertai sistem manajemen data yang makin efisien membuat ruang pembiayaan sistem resi gudang semakin besar.

Sementara itu diinformasikan juga bahwa sektor 'pengelolaan jaminan' SRG yang baru juga telah bermunculan. Mereka adalah perusahaan-perusahaan besar, sering

kali didukung oleh perusahaan swasta yang mengelola [baik memiliki atau menyewakan] gudang, sertifikasi dan nilai barang yang disimpan di sana, mengatur keamanan dan asuransi dan memantau harga komoditas secara *real time*. Selain jasa penyimpanan komoditi, perusahaan juga menyediakan bantuan tambahan seperti sarana perdagangan komoditi dan bantuan menjual komoditi. Pihak perbankan sendiri dikabarkan sering bergantung pada perusahaan pergudangan ini untuk membantu aplikasi pinjaman dan melacak kondisi harga komoditi.

Begitulah perkembangan Sistem Resi Gudang di India. Di atas kertas, resi gudang merupakan proposisi yang menarik bagi bank-bank India untuk membantu mereka secara efisien

Resi Gudang 2010/11-2017/18



mendapatkan target prioritasnya. Namun dalam prakteknya, sebagian besar bank-bank tidak memiliki keahlian untuk menilai dan mengelola komoditi, teknologi untuk melacak pergerakan harga komoditi, dan hubungan dengan ekosistem antara gudang-produsen. Ini berarti bahwa bank-bank tersebut bergantung pada penyedia layanan seperti perusahaan manajemen agunan untuk melakukan fungsi-fungsi tersebut. Masalahnya lagi, ketika para penyedia ini berkembang menjadi produsen pembiayaan langsung, maka bank harus bekerja lebih keras untuk mempertahankan bagian mereka.

Beberapa Catatan Pelaksanaan Lelang GKR

Setelah melalui uji coba dan sempat dilaksanakan beberapa kali, Lelang Gula Kristal Rafinasi (GKR) akhirnya dihentikan. Transaksi GKR melalui pasar lelang ini menjadi pelajaran berharga bagaimana menyelenggarakan suatu pasar lelang komoditi secara online

Pasar Lelang Komoditas (PLK) merupakan bagian dari kerja Bappebti [Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi] Kementerian Perdagangan yang sudah lama ada. Banyak komoditi yang ditransaksikan melalui PLK, seperti jagung, beras, rumput laut dan komoditi lain yang termasuk dalam Sistem Resi Gudang [SRG].

Salah satu komoditi yang belakangan menjadi hangat diperbincangkan adalah Lelang Gula Kristal Rafinasi [GKR]. Komoditi ini sangat strategis bagi industri makanan dan minuman [mamin], karena nyaris setiap produk industri mamin menggunakan GKR sebagai bahan dasarnya.

Realitas tentang Gula Kristal Rafinasi adalah terjadinya perembesan GKR ke pasar konsumsi. Rembesan terjadi karena produsen/industri mamin skala kecil dan menengah [IKM/UKM] tidak bisa mengakses GKR dengan mudah, sehingga mereka harus mencari celah untuk mendapatkannya. Situasi pasar GKR ini menyebabkan: pertama, pemerintah tidak bisa membuat neraca gula yang benar. Kedua, pabrik GKR dan/atau pengusaha makanan dan minuman skala menengah-besar membocorkan dengan menjual sebagian jatah GKR

Uji Coba Lelang GKR

Uji coba lelang pun dilaksanakan sejak akhir tahun 2017 dimana pelaksana lelang dilakukan oleh PT Pasar Komoditas Jakarta [PT PKJ]. Dalam tahap persiapan ini Bappebti telah melakukan berbagai langkah, antara lain berkonsultasi dengan DPR RI, Wantimpres, KPPU, KPK, KEIN dan Ombudsman. Uji coba dilakukan dengan mekanisme pasar lelang yang bersifat terbuka melalui online dengan transaksi secara multilateral [banyak penjual dan pembeli = *many to many*], tidak ada pihak yang saling mengenal dan mengendalikan atau melakukan monopoli.

Pelaksanaan lelang GKR ini semestinya mulai berlangsung sejak 1 September 2017, akan tetapi diundurkan guna membuka kesempatan berbagai pihak dan pelaku pasar ikut serta dalam lelang GKR ini. Penyelenggaraan Pasar Lelang GKR kemudian secara resmi dimulai pada 15 Januari 2018.

Namun demikian setelah melalui serangkaian uji coba dan kemudian sempat beberapa kali dilaksanakan, lelang Gula Kristal Rafinasi [GKR] akhirnya dihentikan. Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 54 Tahun 2018 tentang Pencabutan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/MDAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditi.

Keputusan berat ini diambil dengan memperhatikan rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi [KPK] dan masukan pemangku kepentingan terkait. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti] Bachrul Chairi meminta

penyelenggara Pasar Lelang GKR untuk menghentikan transaksi GKR per 23 April 2018 dan wajib menyelesaikan seluruh penyerahan GKR per 30 April 2018. Kepala Bappebti juga menjelaskan bahwa pelaksanaan kewajiban pasar lelang GKR ini telah beberapa kali ditunda dalam rangka memberikan waktu yang cukup kepada semua pihak, khususnya industri kecil dan menengah, koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta kelompok usaha mikro, kecil dan menengah untuk menjadi peserta pasar lelang GKR.

Harga GKR Jadi Turun

Beberapa catatan tentang pelaksanaan lelang GKR ini adalah per 29 Maret 2018 sebanyak 2.012 peserta telah mendaftar pasar lelang GKR. Para peserta terdiri dari 11 peserta jual dan 2.001 peserta beli. Peserta beli terdiri dari 475 industri besar, kecil, dan menengah, serta 161 koperasi yang beranggotakan 1.227 UMKM dan 138 UKM&UMKM. Catatan lainnya, selama tujuh bulan pelaksanaan lelang GKR sejak 1 September 2017, terlihat adanya penurunan harga GKR dari Rp9.525 [termasuk PPN] pada September 2017 menjadi Rp8.783 [termasuk PPN] pada Maret 2018 dengan harga rata-rata GKR/kg adalah Rp8.890 [termasuk PPN].

Sementara volume GKR yang telah dilelang sebanyak 8.141 ton dengan sebaran wilayah meliputi Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Lampung, dan Sumatra Utara. “Dengan diberlakukannya penghentian perdagangan GKR melalui pasar lelang, diharapkan pengawasan terhadap distribusi GKR tetap terlaksana dan akses mendapatkan GKR bagi industri kecil dan menengah, koperasi dan usaha kecil dan menengah, serta kelompok UKM tidak mendapat hambatan,” kata Bachrul Chairi.



PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 54 TAHUN 2018 TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang : a. bahwa memperhatikan rekomendasi Komisi Pemberantasan Korupsi dan masukan pemangku kepentingan terkait, perlu meninjau kembali ketentuan mengenai perdagangan gula kristal rafinasi melalui pasar lelang komoditas; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pencabutan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916]; 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan [Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5512]; 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 08/M-DAG/PER/2/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 202];

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS SEBAGAIMANA TELAH BEBERAPA KALI DIUBAH TERAKHIR DENGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 73/M-DAG/PER/9/2017 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN NOMOR 16/M-DAG/PER/3/2017 TENTANG PERDAGANGAN GULA KRISTAL RAFINASI MELALUI PASAR LELANG KOMODITAS.

Pasal 1

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 73/M-DAG/PER/9/2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 16/M-DAG/PER/3/2017 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi melalui Pasar Lelang Komoditas [Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 428], dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 2

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 16 April 2018

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

ttd,

ENGARTIASTO LUKITA



Upaya Wujudkan Mimpi Indonesia Sebagai Acuan Harga Timah Dunia

Fakta bahwa Indonesia adalah produsen besar timah di dunia tidaklah terbantah. Namun, kenyataan bahwa Indonesia masih belum menjadi acuan dalam penentuan harga produk pertambangan tersebut dalam perdagangan internasional adalah sebuah ironi. Upaya mewujudkan impian agar Indonesia menjadi kiblat dalam penentuan harga timah internasional merupakan sebuah

tantangan di masa depan.

Sebagaimana pernah disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral [ESDM] Ignasius Jonan dalam Konferensi dan Pameran Timah Internasional 2017 di Nusa Dua, Bali, bulan Juli tahun lalu, pemerintah sangat menaruh perhatian pada masalah perdagangan timah sebagai salah satu sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Ditegaskan Jonan,

Indonesia harus mampu menentukan harga timah dunia, mengingat produksi timah Indonesia yang sangat besar. Indonesia merupakan penghasil timah terbesar kedua setelah China, tetapi memasok sekitar 70 persen kebutuhan dunia. China, meskipun produksinya lebih besar dari Indonesia, tidak melakukan ekspor karena seluruh produksinya untuk konsumsi dalam negeri. "Kita ingin memperoleh harga



yang *fair*, terlebih kita telah memiliki bursa timah," ungkapnya saat itu.

Selama ini referensi harga timah dunia masih ditentukan oleh negara yang bukan produsen timah yakni Inggris yang memiliki London Metal Exchange. Tingkat produksi yang tinggi dan penguasaan sebagian besar pasar internasional belum cukup untuk menjadikan Indonesia sebagai acuan penentuan harga timah dunia. Diperlukan upaya-upaya lain terutama terkait regulasi dan pengembangan aspek kelembagaan dalam pemasaran.

Sejauh ini pemerintah telah melakukan berbagai langkah untuk mendorong pembentukan harga timah yang bisa menjadi referensi dunia. Satu langkah yang cukup signifikan yaitu pembentukan pasar fisik timah [INA-TIN] melalui Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia [BKDI] atau Indonesia Commodity and Derivatives Exchange [ICDX]. Pasar fisik timah melalui ICDX yang mulai diberlakukan pada bulan Agustus 2013 itu setelah berjalan beberapa tahun mulai menunjukkan dampak positif terhadap harga timah. Harga timah yang pada tahun-tahun sebelumnya sempat anjlok pada kisaran USD14.000 per metrik ton, terdorong naik hingga sekitar USD20.000 per metrik ton pada akhir tahun 2017. Selain itu, harga timah ICDX juga turut menjadi

penggerak harga timah dunia.

Dampak positif lain dari keberadaan pasar fisik timah ICDX yaitu mengurangi kegiatan perdagangan atau transaksi timah secara ilegal yang selama ini juga mempengaruhi harga.

Kontrak Berjangka Timah

Keinginan agar Indonesia menjadi acuan penentuan harga timah dunia akan lebih cepat terealisasi bila sudah ada kontrak berjangka timah [*tin futures*]. Hal itu pula yang tengah diupayakan pemerintah bersama ICDX sebagai bursa berjangka komoditi yang selama ini telah menjalankan pasar fisik timah. Perdagangan berjangka timah melalui ICDX direncanakan dimulai pada bulan Januari 2018, kemudian ditunda sampai Maret 2018. Namun, hingga akhir Maret 2018 perdagangan kontrak berjangka timah belum juga terealisasi.

Sebagaimana dilansir portal berita kontan.co.id [1/2/2018], Kepala Biro Pembinaan dan Pengembangan Pasar Bappebti, Dharmayugo Hermansyah, menjelaskan, penundaan pelaksanaan perdagangan berjangka timah dikarenakan masih ada proses yang perlu dibicarakan untuk menetapkan faktur pajak. Yaitu apakah penetapan faktur pajak diberlakukan pada harga awal saat timah masuk ke PLB [Pusat Logistik Berikat] atau harga setelah

ditransaksikan. Untuk itu, Bappebti berencana akan mengundang Dirjen Pajak untuk membicarakan hal ini.

Sementara itu, menyangkut PLB diungkapkan Dharmayugo, relatif tidak ada masalah. PLB yang merupakan anak perusahaan ICDX [ICDX Logistik Berikat/ILB] sudah beroperasi sejak bulan Oktober 2017 di Pangkal Pinang, Provinsi Bangka Belitung. Keberadaan PLB sangat penting untuk mendukung perdagangan berjangka timah. PLB menjadi tempat menampung komoditi timah yang akan diekspor dan berfungsi sebagai resi gudang. Timah yang berada di dalam gudang ILB dapat diperjualbelikan tanpa perlu keluar dari tempat tersebut. Sehingga transaksi terus berjalan tanpa perlu adanya lalu lintas logistik. Dengan demikian keberadaan PLB memberi kepastian dan jaminan bagi pembeli dari luar negeri dan dapat melakukan lindung nilai.

Dengan beroperasinya PLB dan berlakunya perdagangan berjangka di ICDX, diharapkan perdagangan timah Indonesia akan semakin tumbuh dan berkembang dalam waktu dekat ini. Pun, harapan Indonesia menjadi acuan harga timah dunia akan bisa diwujudkan. Semoga.

Rakor BAPPEBTI-Aparat Penegak Hukum



Bappebti bekerjasama dengan Dinas Perdagangan Kota Malang, Jawa Timur, menyelenggarakan rapat koordinasi dengan aparat penegak hukum di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi, Rabu [28/3]. Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan dan Penindakan Bappebti, M. Syist, menyampaikan sambutan mewakili Kepala Bappebti. Rakor yang dibuka oleh Kepala Dinas Perdagangan Kota Malang, Wahyu Setianto, ini dihadiri oleh berbagai instansi antara lain Dinas Perdagangan, Kejaksaan Negeri, Polresta, Pengadilan Negeri, OJK, Dinas Kominfo, dan Civitas Akademika Universitas Brawijaya.

Lakukan Tindakan Preventif, Bukan Korektif



Kepala Bappebti Bachrul Chairi meminta pelaku usaha Perdagangan Berjangka melakukan tindakan preventif [pencegahan], bukan korektif. Untuk itu perlu dilakukan pengawasan secara bersama-sama antara Bappebti dan SRO untuk mencegah terjadinya penyimpangan di industri PBK, salah satunya dengan optimalisasi sistem yang saat ini telah dimiliki oleh Bappebti, Bursa Berjangka dan Lembaga Kliring Berjangka. Hal ini disampaikan Kepala Bappebti saat membuka Konsinyering Analisa Laporan Keuangan Pialang Berjangka Periode Tahun 2017 di Jakarta, Senin [26/03].

Penyampaian Hasil Evaluasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka

Pada Konsinyering Analisa Laporan Keuangan Pialang Berjangka Periode Tahun 2017 di Jakarta, Senin [26/03], Kepala Bagian Pengawasan Kepatuhan Bappebti, Danny Agus, menyampaikan hasil Evaluasi Pelaporan Keuangan Pialang Berjangka yang dilakukan oleh Bappebti. Selain Bappebti evaluasi pelaporan keuangan juga disampaikan oleh perwakilan PT Bursa Berjangka Jakarta, Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia, dan PT Kliring Berjangka Indonesia [persero]. Kesimpulan dan penutupan dilakukan oleh Kepala Biro Pengawasan Pasar Berjangka dan Fisik, Pantas Lumban Batu.



Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan PBK



Bekerjasama dengan Asosiasi Perdagangan Berjangka Komoditi [Aspebtindo] Bappebti menyelenggarakan kegiatan Pertemuan Teknis Implementasi Ketentuan di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK]. Acara yang berlangsung di Denpasar, Bali, Selasa [20/3] ini dibuka oleh F. Wishnubroto selaku Ketua Umum Aspebtindo. Peserta yang hadir adalah para Kepala Cabang Pialang Berjangka di daerah Bali, Sulawesi Nusa Tenggara Barat dan Jawa Timur [Malang dan Jember]. Kepala Biro Pengawasan Perdagangan Berjangka dan Fisik, Bapak Pantas Lumban Batu, menjelaskan Evaluasi hasil Kepatuhan Kantor Cabang Pialang Berjangka serta Implementasi Peraturan Kepala Bappenti Nomor 7 Tahun 2017 tentang Persyaratan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Direktur Kepatuhan Pialang Berjangka Direktur Kepatuhan.

Forum Konsultasi Teknis Pembangunan Gudang SRG



Inspektur Jenderal Kemendag, Srie Agustina selaku Plh. Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi [Bappebti] membuka dan memberikan arahan pada acara Forum Konsultasi Teknis (FKT) Pembangunan Gudang SRG dan Sarana Penunjang Lainnya melalui Dana Alokasi Khusus Tahun 2018 di Bogor, Senin [19/3]. Srie Agustina menyampaikan bahwa Kementerian Perdagangan mengemban amanat untuk memperkuat pasar domestik, meningkatkan ekspor non migas dan mengembangkan pasar rakyat. Sekretaris Bappebti, Nusa Eka dalam laporannya menyampaikan bahwa FKT dilaksanakan agar pelaksanaan pembangunan Gudang SRG dan sarana penunjangnya dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Kebijakan Dana Alokasi Khusus 2018 Di Bidang Pasar



Pada hari kedua Selasa [20/3] FKT Pembangunan Gudang SRG, Kepala Biro Perencanaan Kemendag Didi Sumedi menjelaskan tentang Kebijakan Alokasi DAK Tahun 2018 Bidang Pasar. Sementara Kepala Biro Pembinaan dan Pengawasan SRG dan PLK Retno Rukmawati menyampaikan Perkembangan dan Implementasi SRG di Indonesia. FKT dihadiri oleh perwakilan dinas yang membidangi perdagangan dari 18 kabupaten penerima DAK Tahun 2018, yaitu Aceh Tengah, Pidie, Tanggamus, Garut, Pandeglang, Tasikmalaya, Sumedang, Brebes, Jepara, Kudus, Demak, Purworejo, Wonogiri, Tuban, Probolinggo, Banyuwangi, Tapin dan Barito Kuala

Indonesia-Jepang Sepakat Penyelesaian General Review IJEPA



Pertemuan *The 7th Joint Committee Meeting General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* berhasil menyepakati rumusan rencana kerja untuk penyelesaian General Review IJEPA. Pertemuan kedua negara Indonesia dan Jepang ini berlangsung 28-30 Maret 2018 di Bali. Ketua Tim Perunding Indonesia meminta semua Sub Komite mempercepat proses penyelesaian General Review IJEPA yang diharapkan akan menjadi salah satu capaian dalam peringatan 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Jepang tahun ini. Kedua negara akan kembali bertemu pada perundingan ke-8 *Joint Committee Meeting General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement* yang rencananya akan diseleenggarakan di Jepang pada Agustus 2018.

Rakor Kesiapan Harga Dan Stok Barang Kebutuhan Pokok



Menteri Perdagangan, Enggartiasto Lukita, menggelar Rapat Koordinasi Kesiapan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok Menjelang Puasa dan Lebaran 2018/1439 H di Kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta, Rabu [28/3]. Pertemuan ini merupakan finalisasi dari rangkaian pertemuan sebelumnya yang mengundang para pemangku kepentingan dalam rangka menjaga harga dan stok bahan pokok di setiap daerah menjelang hari besar keagamaan nasional (HBKN). Mendag menekankan bahwa seluruh pedagang beras di pasar tradisional wajib menjual beras medium sesuai dengan harga eceran tertinggi (HET) di wilayahnya masing-masing, minyak goreng seharga Rp11.000/liter dan daging beku sebesar Rp80.000/kg.



Permintaan Timah Dan Nikel Dunia Naik

dagang antara AS-China tidak kunjung berakhir, bakal mengganggu stabilitas harga nikel dan timah di kuartal II.

Nikel menjadi salah satu logam industri yang berpotensi turun harganya jika sentimen negatif tersebut terus berlangsung. Sebab, nikel merupakan bahan baku pembuatan baja. Sementara, salah satu pemicu terjadinya perang dagang adalah kebijakan tarif impor terhadap produk baja yang diberlakukan oleh Amerika Serikat.

Andri Hardianto memproyeksikan harga nikel pada kuartal kedua tahun ini akan bergerak di kisaran USD 12.300-USD 15.000 per metrik ton, sedangkan harga timah akan berada di kisaran USD 19.950-USD 22.600 per metrik ton.

Sebelumnya, pada kuartal I 2018, baik nikel dan timah mengalami tren penguatan. Berdasarkan data *Bloomberg*, harga nikel menguat 4,23% ke level USD 13.300 per metrik ton sepanjang triwulan pertama 2018. Adapun, harga timah menguat 5,36% menjadi USD 21.100 per metrik ton pada waktu yang sama.

Memasuki kuartal kedua tahun 2018 harga timah dan nikel diperkirakan masih terus menguat. Penguatan harga kedua komoditi ini didorong oleh permintaan yang tinggi di tengah masih berkurangnya pasokan. "Permintaan untuk timah cukup besar, terutama dari sektor industri elektronik seperti *smartphone*. Timah diperkirakan kembali mengalami defisit pasokan sebesar 10.000 ton sehingga harganya berpeluang melonjak," ucap Andri Hardianto dari Asia Tradepoint Futures, Selasa [3/4].

Permintaan nikel juga cukup tinggi karena sejumlah negara sudah mulai meningkatkan produksi kendaraan listrik. "Permintaan dari sektor industri baja juga masih cukup tinggi," katanya. Di sisi lain pasokan nikel diperkirakan masih akan mengalami defisit sekitar 80.000-90.000 ton pada kuartal kedua ini. Namun demikian bisa jadi jika perang

Indonesia-Jepang Targetkan Penyelesaian General Review IJEPA Pada Akhir 2018



General Review Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement (IJEPA) yang telah digulirkan sejak tahun 2015 ditargetkan selesai akhir tahun 2018. Masalah ini dibahas dalam pertemuan Komite Bersama IJEPA ke-7 yang berlangsung di Nusa Dua, Bali pada 28-30 Maret 2018.

Delegasi Indonesia dipimpin Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan, Iman Pambagyo, sementara Delegasi Jepang dipimpin Deputi Direktur Jenderal Kementerian Luar Negeri Jepang Keiya Iida. "Tahun 2018 merupakan tahun penting dan kesempatan emas bagi Indonesia dan Jepang, dalam rangka merayakan 60 tahun hubungan kedua negara. Untuk itu, kedua delegasi mendapatkan momentum positif dan berkomitmen menyelesaikan proses General Review IJEPA tahun ini. Penyelesaian ini akan menjadi salah satu capaian bidang ekonomi bagi kedua negara," ujar Iman.

Iman menyatakan, dalam pembahasan General

Review ini dilakukan evaluasi pelaksanaan perjanjian yang telah berlangsung sejak implementasi IJEPA tahun 2008. Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, kedua negara akan menyusun *Joint Report* yang mencakup rekomendasi perjanjian agar lebih sesuai dengan perkembangan saat ini. Selain itu, kedua delegasi juga membahas upaya perbaikan di beberapa sektor, baik dalam hal akses pasar, *rules* [pengaturan], dan kerja sama. "Tentu saja semua dilakukan berdasarkan prinsip kerja sama dan saling menguntungkan," tambahnya.

Delegasi Indonesia memandang bahwa General Review merupakan kesempatan untuk membawa hubungan ekonomi kedua negara ke tingkat yang lebih tinggi. Jepang dan Indonesia selama ini memiliki hubungan yang erat di berbagai bidang dan IJEPA semakin menguatkan kemitraan kedua negara.

Gelar Klinik Produk Ekspor Teh Untuk Tingkatkan Daya Saing

Kementerian Perdagangan terus berupaya mendiversifikasi produk teh Indonesia agar semakin bernilai tambah dan berdaya saing untuk memperkuat pasar ekspor. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan membuat Klinik Produk Ekspor Teh.

Dalam seminar tentang 'Peluang Ekspor Produk Teh ke Mancanegara' di Bandung, Jawa Barat, Rabu [28/3], Dirjen Pengembangan Ekspor Nasional (PEN), Arlinda, berharap Klinik Produk Ekspor Teh dapat membantu membangkitkan kejayaan teh di antara eksistensi produk-produk agro Indonesia lainnya di pasar global, seperti kopi dan kelapa sawit, yang saat ini tengah tumbuh baik secara nilai maupun volumenya.

Seminar yang terselenggara atas kerja sama Kemendag dengan Asosiasi Teh Indonesia (ATI) ini dipaparkan upaya menanggulangi hambatan ekspor teh Indonesia ke luar negeri, serta hal-hal yang harus diperhatikan agar komoditas teh Indonesia dapat diterima di pasar luar negeri.

Indonesia mencatatkan ekspor teh Indonesia tahun



2017 sebesar USD 117,96 juta, atau meningkat 1,04% dibanding tahun 2016 yang sebesar USD 116,75 juta. "Target yang diharapkan oleh Kemendag adalah adanya peningkatan pada grafik ekspor teh Indonesia yang meski pun perlahan tapi pasti. Di pasar ekspor, Indonesia memiliki teh berkualitas baik dan aroma khas yang disukai oleh masyarakat global. Untuk lebih memanfaatkan potensi pasar ekspor teh Indonesia, para pelaku usaha harus mampu mempersiapkan manajemen yang efektif untuk penciptaan nilai tambah hingga inovasi produk," ujar Direktur Pengembangan Produk Ekspor Kemendag, Ari Satria.

Acara Klinik Produk Ekspor Teh ini semakin ramai dengan *tea tasting* dimana para peserta berkesempatan mencicipi berbagai komoditas teh unggulan Indonesia seperti teh hijau dan teh hitam. Selain itu, diadakan pula *one-on-one business meeting*.

Dalam Tempo Tiga Bulan Harga Emas Antam Naik Rp 15.000



Emas batangan produksi PT Aneka Tambang Tbk [Antam] menunjukkan harga yang menggairahkan bahkan lebih tinggi dibandingkan emas di pasar spot. Pelemahan nilai rupiah juga telah mendorong permintaan emas batangan sebagai aset lindung nilai.

Seperti dirilis www.logammulia.com, selama kuartal I 2018, harga jual emas Antam pecahan 1 gram naik 2,37 persen atau sekitar Rp 15.000 menjadi Rp 651.000. Sementara akhir 2017 lalu harganya masih bertengger pada level Rp 632.000 per gram.

Kenaikan juga terjadi pada harga beli kembali alias *buyback*. Selama tiga bulan pertama 2018 harganya naik 2,49 persen atau sekitar Rp 14.000. Ini bisa terlihat pada 30 Desember 2017 harga jual kembali masih berada di level Rp 563.000 per gram, tetapi pada penghujung

Maret 2018 sudah naik menjadi Rp 582.000 per gram.

Analisis PT Asia Tradepoint Futures, Deddy Yusuf Siregar, menilai penguatan harga emas batangan ini salah satunya karena pelemahan mata uang negara berkembang, termasuk rupiah, dimana investor lebih memilih emas. Sebagai salah satu aset berisiko, mata uang Garuda banyak ditinggalkan dan investor lebih beralih memburu emas batangan batangan ketimbang menyimpan mata uang.

Selama kuartal pertama 2018 valuasi nilai tukar rupiah terhadap dollar AS sudah tertekan 1,54 persen yaitu dari Rp 13.557 per dollar AS menjadi Rp 13.766 per dollar AS. Selain pengaruh pergerakan mata uang, kenaikan harga emas batangan ini juga tidak bisa dilepaskan dari pengaruh pergerakan emas di pasar spot.

Emas Dunia Naik Lagi Karena Pernyataan Trump Soal Tambahan Tarif Terhadap China



Menjelang akhir pekan minggu pertama bulan April 2018 harga emas dunia naik lagi. Pada perdagangan hari Jumat [6/4] pukul 8.00 WIB, harga emas untuk pengiriman Juni 2018 di Commodity Exchange naik 0,42% ke US\$ 1.334,10 per troy ounce.

Salah satu pemicu kenaikan harga emas ini adalah pernyataan Presiden Amerika Serikat [AS], Donald Trump, yang menginstruksikan perwakilan perdagangan AS untuk mempertimbangkan tambahan tarif hingga US\$ 100 miliar terhadap China.

"Mengingat pembalasan China yang tidak adil, saya

memerintahkan perwakilan perdagangan AS untuk mempertimbangkan apakah tarif tambahan US\$ 100 miliar bisa dilakukan dengan mempertimbangkan ketentuan 301 dan mengidentifikasi produk-produk yang bisa dikenai tarif," ungkap Trump dalam pernyataan, Kamis [5/4].

Harga emas masih bertahan dalam rentang pergerakan sempit. "Level US\$ 1.350-US\$ 1.360 merupakan *resistance* yang harus dilewati, tapi tidak ada katalis yang bisa memicu harga ke atas," ujar Tyler Richey, co-editor Sevens Report sebagaimana dikutip Reuters.

Harga CPO Sulit Menanjak Pada Kuartal II-2018



Harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* [CPO] diperkirakan masih sulit menanjak pada tahun ini. Sepanjang kuartal pertama 2018 harga minyak sawit sudah terlihat melemah.

Menurut Bloomberg per akhir Maret 2018 harga CPO kontrak pengiriman Juni 2018 di Malaysia Derivatives Exchange ditutup di level RM 2.424 per metrik ton. Itu berarti CPO sudah turun sebesar 3,85 persen sepanjang kuartal pertama 2018.

Wahyu Tribowo Laksono, analis PT Central Capital Futures memproyeksikan harga CPO pada tahun ini masih terancam dan cenderung melemah. Penyebabnya, stok CPO melimpah dan ringgit Malaysia yang menguat. Selain itu, harga CPO juga masih akan tertekan karena isu penolakan Uni Eropa. Apalagi, isu China yang akan mengurangi impor minyak sawit dan menggantinya dengan minyak kedelai yang melimpah serta murah.

Bagaimana dengan India yang selama ini konsumsi CPO-nya tinggi? Kebijakan India yang menaikkan

pajak impor minyak sawit juga berpotensi menekan penguatan harga CPO. Apalagi, India berencana untuk mendukung petani lokal CPO sehingga berpotensi mengurangi permintaan impor CPO.

Wahyu menambahkan, meskipun pada kuartal II 2018 harga CPO masih akan sulit naik dan rentan turun karena pasokan berlebih, namun penurunannya akan terbatas tidak sampai ke bawah RM 2.000 per metrik ton. Diperkirakan, harga minyak mentah global akan naik dan bisa mendukung harga CPO sehingga tidak jatuh tajam. "Minyak sedang bullish sekarang setelah melewati level US\$ 60 per barel dan kemungkinan bisa menuju harga US\$ 70-US\$ 80 per barel, jika harga minyak terus terjaga harga CPO tidak akan jatuh di bawah RM 2.000 per metrik ton," katanya.

Di kuartal II 2018, Wahyu memproyeksikan harga CPO akan bergerak di rentang RM 2.300-RM 2.650 per metrik ton.

Ramadhan Jadi Salah Satu Harapan CPO

Di tengah kecenderungan penurunan harga CPO, pasar berharap harganya bisa terangkat menjelang masuknya bulan suci Ramadhan pada bulan Mei 2018.

Analisis pasar komoditi Deddy Yusuf Siregar menyatakan biasanya memasuki kuartal II dan jelang Ramadhan permintaan CPO berpotensi meningkat. "Negara Timur Tengah jelang Ramadhan mulai restock sehingga membuat permintaan CPO cukup tinggi," katanya, Kamis [29/3].

Hingga saat ini, Deddy belum melihat sentimen positif lain yang bisa mengangkat harga CPO. Deddy memproyeksikan jelang Ramadan harga CPO bisa berada di atas RM 2.500. Sementara produksi CPO Indonesia dan Malaysia, dua



negara penghasil utama CPO, diperkirakan akan lebih banyak dibandingkan dengan tahun lalu yang mengakibatkan harga tetap akan tertahan. "Harga masih tergantung dari bagaimana permintaan negara yang biasa impor CPO seperti China dan India," kata analis dari Asia TradePoint Futures ini.

Mutu Garam Membaik, Harga Pun Melonjak



teknologi produksi oleh para petani. "Ada penggunaan teknologi dalam memproduksi garam itu, sehingga kualitasnya bagus yang tentunya berdampak terhadap tingginya harga garam yang dihasilkan," tambah Sari.

Saat ini warna garam yang dihasilkan tidak lagi kusam, melainkan berwarna putih bersih. Selain itu waktu panen juga lebih cepat yakni hanya 14 hari. Sebelumnya dengan cara tradisional panen garam baru bisa dilakukan setelah 30 hari.

Data Dinas Perikanan setempat, potensi garam di Karawang cukup tinggi yakni 1.000 hektar lahan tambak garam dengan produksi 2.000 ton garam dalam setahun. Produksi garam ini tersebar di empat kecamatan yakni di Kecamatan Cilamaya Wetan, Cilamaya Kulon, Tempuran dan Kecamatan Cilebar.

Para petani garam di kawasan Pantura Kabupaten Karawang saat ini tengah menikmati harga garam yang baik. "Jika sebelumnya harga garam yang diproduksi petani Karawang hanya sekitar Rp300-Rp500 per kilogram, sekarang sudah melonjak hingga Rp3.000 per kilogram," kata Sekretaris Dinas Perikanan Karawang Sari Nurmiasih, di Karawang, Sabtu [7/4].

Membaiknya harga garam petani ini disebabkan mutu garam yang diproduksi memang bagus, menyusul dilakukannya perbaikan kualitas garam dengan penerapan

Glossary

Contango

Market situation in which prices in succeeding delivery months are progressively higher than in the nearest delivery month, the opposite of "backwardation".

Contract

[1] A term of references describing a unit of trading for a commodity future or option; [2] An agreement to buy or sell a specified commodity, detailing the amount and grade of the product and the date on which the contract will mature and become deliverable. Contract Grades Those grades of a commodity or financial instrument which have been officially approved by the exchange as deliverable in settlement of a futures contract.

Contract Market

A broad of trade or exchange designed by the Commodity Futures Trading Commission to trade futures or options under the Commodity Exchange Act.

Contract Month

The month in which delivery is to be made in accordance with a futures contract.

Contract Unit

The actual amount of a commodity designed in a given futures contract.

Controlled Account

Any account for which trading is directed by someone other than the owner. Also called a Managed Account or a Discretionary Account.

Convergence

The tendency for prices of physicals and futures to approach one another, usually during the deliver month. Also called a "narrowing of the basis".

Conversion

When trading options on futures contracts, a position created by selling a call option, buying a put option, and buying the underlying futures contract, where the options have the same strike price and the same expiration.

Corner

[1] To corner is to secure such relative control of a commodity or security that its price can be manipulated; [2] In the extreme situation, obtaining contracts requiring delivery of more commodities or securities than are available for delivery.

Export Value of 2017 Increased Indonesia Tea Industry Potentially Continues to Grow



Director of Export Product Development of the Ministry of Trade, Ari Satria, said the export value of Indonesian tea to various countries during the year 2017 amounted to 117.96 million US dollars. Compared to 2016 which reached 116.75 million US dollars, that number increased 1.04 percent. Ari Satria conveyed that in a seminar

titled Clinic Export Products: Export Opportunities Tea Products to Abroad, in Bandung, West Java, Wednesday [28/3].

Although relatively small, the increase in export value according to Ari shows the potential of the Indonesian tea industry to continue to grow. Previously, during 2012-2016 the value of Indonesian tea exports tended to fall by 8.08 percent. Some of the causes are the decline in global purchasing power and the trend of depreciation of the national tea plantation area due to land conversion.

The increase in the value of Indonesian tea exports in 2017 brings optimism. "The target that the Ministry of Trade hopes for is an increase in the graph of Indonesian tea exports, which although slowly but surely. In the export market, Indonesia has good quality tea and a distinctive aroma favored by the global community," said Ari.

Strong Price, BK CPO Zero



Crude Palm Oil (CPO) product reference price for April 2018 period for the determination of Export Duty (BK) is USD 711.62 / MT. The reference price strengthened USD 3.02 or 0.43% from March 2018 period of USD 708.60 / MT. "Currently the CPO reference price is strengthening and remains at a level below USD 750 / MT. Therefore, the

government imposed a CPO export duty of USD 0 / MT for the period of April 2018," said Director General of Foreign Trade Ministry of Trade Oke Nurwan as reported by Kemendag.go.id website, March 27, 2018.

This stipulation is contained in Regulation of the Minister of Trade No. 45 of 2018 concerning Export Check Price Determination (HPE) on Agricultural and Forestry Products Subject to Export Duty.

BK CPO for April 2018 is contained in Column 1 of Attachment II Letter C of the Minister of Finance Regulation no. 13 / PMK.010 / 2017 of USD 0 / MT. The value is equal to BK CPO for the period of February 2018 of USD 0 / MT.

PT Timah Invests US \$26 Million in Nigeria

Indonesian tin mining company PT Timah Tbk will invest US\$26 million or equivalent to Rp356.2 billion to realize the business expansion of the state-owned enterprise in Nigeria.

PT Timah's President Director Mochtar Riza Pahlevi Tabrani said on Thursday [12/4] that he was optimistic the presence of PT Timah in Nigeria would open up cooperation opportunities in other forms, especially in the mining and exploration sectors, to supplement the reserves that are being maximized by the mining holding.

"We continue to focus on working on strategic steps to realize the company's expansion in Nigeria. This is a serious measure taken by Indonesia to enhance



economic ties with African countries," he remarked. The concession area in Nigeria 16,000 hectares, and the first phase of production is expected to reach 5,000 metric tons per year. This amount will increase reserves and will make PT Timah the world's number one tin producer.



World Bank: Indonesia's Economy To Grow 5.3 Percent

World Bank has predicted that Indonesia's economy would grow 5.3 percent this year, more conservative than 5.4 percent growth target set in the state budget. "We predict Indonesia's economy would grow 5.3 percent up from 5.1 percent in 2017," World Bank's senior economist Derek Chen said in Jakarta, Thursday [12/4].

Chen said investment and household consumption would be the main the growth drivers of the country's economy, adding the regional elections would increase household consumption this year.

"Investment is very strong and we see household consumption would grow slightly as a result of the elections," he said.

He said the regional election in 2019 and the legislative and presidential elections in 2019, would

not pose a bottleneck for economic activities. "After the elections, investment would grow faster with political uncertainties expected to begin to recede. Perhaps now investors are awaiting what would happen in 2018 and 2019 and it is believed there would not be much of a shock. Investment, therefore, would flow in again. Such would happen not only in Indonesia, but other countries would also experience the cycle," he added.

In the report of "World Bank East Asia and Pacific Economic Update of April 2018 edition: Enhancing Potential" released on Thursday, the developing economies in East Asia and Pacific are predicted to remain strong with a growth of 6.3 percent in 2018. "The prospects of faster global recovery and strong domestic demand would support the positive projection, but the risk that come with stability and sustainable growth would need serious addressing," Chen said.

Lessons from Japan: A story about IATSS Forum Leadership Training

Annisa F Wulandari
Kasubbag Kerja Sama Media Bappebti

Being selected as one of the participants from Indonesia in the leadership training held by IATSS Forum Japan was one of my proudest moments. This program has been conducted since 1985 and was initiated by Soichiro Honda, founder of Honda Motor. I joined the 56th IATSS Forum Training Program back in 2016 and here's my story.

There were a total of 19 young professionals from Japan and respected ASEAN countries who had the chance to learn in Japan for 55 days (September – November 2016). We spent most of our training days in Suzuka city – Mie Prefecture, although we also had a chance to visit Tokyo, Kyoto, Osaka, Kobe, Iga and Toba to learn different topics and themes.

The forum provided opportunities for participants to understand each other's countries through seminars, field studies, group study, and cultural exchange, as well as to make efforts to solve current issues in ASEAN and Japan, under the motto "Thinking and Learning Together."

The selection for IATSS Forum was held in Jakarta in December 2015. There were 20 candidates from different provinces in Indonesia who passed the first screening and were invited to an interview. Before the interview, there was a role play and group work where all the candidates were closely observed by 9 assessors. They were the representative of Embassy of Japan, IATSS Forum Japan, Indonesia IATSS Forum Alumni, Astra Honda Motor, academic professor, and psychologist. The role play was designed to match the training in Japan.

The main theme of the training was Sustainable Community Design, in which all the participants learned the basic of sustainable communities. There was also introduction to different sustainable community design projects. Not only that, but we also learned about general themes, such as modernization, politics, urban planning, education, environment, and One Village One Product (OVOP). I loved the discussion and study about OVOP.

OVOP is a concept where the community help themselves to produce one competitive product in their own village as a business to gain sales revenue to improve the standard of living and prosperity in their community, while also preserving the environment. The community needs to be independent and creative in finding products with high added value.

What I remember the most about the lecture was the quote from the former Oita Prefecture Governor, Morihiko Hiramatsu who said: "local government helps those who help themselves." I think this is an important quote because he emphasized on how important it was for the community to help themselves and change their living situation, instead of wishing for the government to help them have a better life.

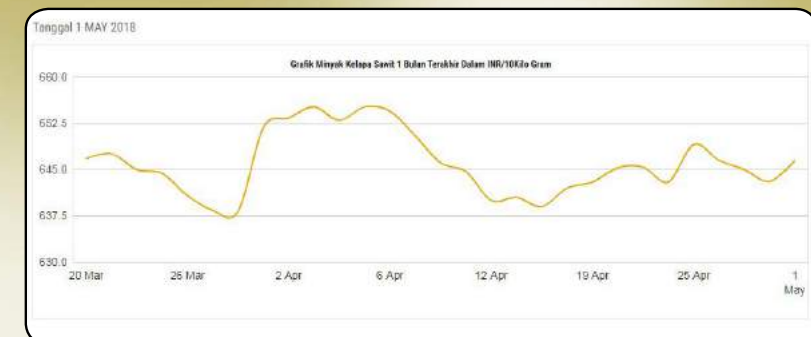
The important issue of OVOP Implementation in Indonesia is the lack of understanding of OVOP philosophy. The characteristic of programs in Indonesia is the top-down policy (where the government initiates the project), in contrary to OVOP concept, which is bottom-up.

Working for the government, I noticed that many of our programs were not successful in reaching the goals and helping the people in a community. Many times, we made a policy that was aimed at improving the life of people, but ended up failing in the process. From the program, I realize that creating a successful program for a community requires active participation and involvement of the community in that particular area.

Many Indonesians expect the government to make a 'miraculous policy' to help them overcome difficulties in life (poverty, employment, traffic, drugs, pollution). It will not work that way though. The government may have an initiative, however, the success and the failure of it would depend on the support of the community. The community plays an important part to run and oversee the process. They need to feel like they belong to the program. When the community has a sense of pride of what they are doing, they will work really hard to reach the goals. Now, the challenge is to make the people/ community aware of the role.

I learned so much from the IATSS Forum staffs and some Japanese people I met during my training, I admire their hard work, dedication and commitment to help nurture human resources for ASEAN region's sustainable development. I learn about the value of time, the importance of planning, the prioritization of group harmony and the idea of respecting the nature and the people. The lesson I learned and the friendship I made with other Japanese and ASEAN participants in Japan will forever be engraved in my heart. I am also grateful for all the support I got from BAPPEBTI. Thank you.

For more information about the program, please visit <https://www.iatssforum.jp/en/>



https://www.seputarforex.com/data/komoditas/grafik.php?komoditas=minyak_kelapa_sawit&kode=crude_palm_oil



Setelah naik pada akhir Maret hingga awal April 2018, harga minyak sawit mentah atau *crude palm oil* (CPO) diperkirakan akan kembali melandai. Sebagian besar indikator teknis masih memberi sinyal terjadinya penurunan harga.

Mengutip pendapat Deddy Yusuf Siregar, analis PT Asia TradePoint Futures, ia memprediksi harga CPO akan berada di kisaran RM 2.379-RM 2.422 per metrik ton. Menurut Bloomberg, Senin (12/3), harga CPO kontrak pengiriman Mei 2018 di Malaysia Derivatives Exchange naik 0,17% ke level RM 2.380 per metrik ton

Harga CPO masih berada di bawah garis *moving average* (MA) 50, MA 100 dan MA 200, yang mengindikasikan pelemahan. Indikator *moving average convergence divergence* (MACD) juga berada di area negatif dan indikator *relative strength indeks* (RSI) berpotensi melemah di level 31. Tetapi indikator *stochastic* berada di level 31 yang menunjukkan potensi *rebound*.



https://www.seputarforex.com/data/komoditas/daftar_komoditas_untung_sebulan.php



Setelah mengalami masa yang lesu dalam 2 tahun terakhir akibat berlebuhnya pasokan, harga kakao dunia saat ini mengalami penguatan yang menggembirakan dengan pertumbuhan hingga 32%. Seperti dikutip *Bloomberg*, harga kakao berjangka kontrak teraktif Mei 2018 di ICE Futures New York telah melaju di atas level US\$2.000 per ton sejak 1 Februari 2018 dan terus melaju hingga bergerak mendekati level US\$2.500 per ton.

Analisis Asia Trade Point Futures (ATPF), Andri Hardianto, menjelaskan bahwa penguatan harga kakao yang terjadi sejak awal tahun 2018 ditopang oleh sentimen positif dari kondisi cuaca yang tidak menentu di Pantai Gading, Afrika Barat, yang menjadi penghasil utama kakao dan juga akibat kenaikan permintaan.

KONSUMEN CERDAS DI ERA EKONOMI DIGITAL

PORTAL NASIONAL PERLINDUNGAN KONSUMEN

Portal Nasional Perlindungan Konsumen dibentuk berdasarkan amanat Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen, sebagai sarana bagi konsumen untuk memperoleh informasi terkait perlindungan konsumen serta mengajukan permasalahan yang dialami karena menggunakan barang atau memanfaatkan jasa yang diperdagangkan oleh pelaku usaha.

Tampilan Portal:
www.konsumen-indonesia.go.id

Hari Konsumen Nasional: Upaya Melayani Sang Raja

Bagi masyarakat Indonesia, April merupakan bulan istimewa. Kaum wanita khususnya pasti akan mengingat bulan April, karena bulan ini adalah bulan kelahiran seorang pembawa terang bagi kaum Hawa di bumi Nusantara ini.

RA Kartini, dialah sang emansipatoris wanita Indonesia! Setiap tahun, pada tanggal kelahirannya yaitu 21 April, masyarakat Indonesia mengenang jasa-jasa puteri seorang bangsawan di Kabupaten Jepara, Jawa Tengah,

itu dalam memperjuangkan hak-hak perempuan di Tanah Airnya yang pada masa itu masih diselimuti kabut kegelapan kolonialisme.

Ihwal Hari Kartini tanggal 21 April, hampir seluruh rakyat Indonesia bisa dipastikan mengenal dan mengetahuinya. Namun, sebenarnya ada satu tanggal lain di bulan April yang juga patut diketahui dan dirayakan masyarakat Indonesia. Yaitu tanggal 20 April, yang telah ditetapkan sebagai "Hari Konsumen Nasional". Penetapan

Hari Konsumen Nasional (Harkonas) didasarkan Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2012. Sedangkan pemilihan tanggal 20 April mengacu pada tanggal diberlakukannya UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Penetapan Hari Konsumen Nasional menunjukkan komitmen pemerintah terhadap perlindungan konsumen. Setiap tahun pemerintah, di bawah koordinasi Kementerian Perdagangan, bersama unsur masyarakat memperingati Hari Konsumen Nasional. Tujuannya tidak lain dari upaya untuk membangun kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen.

Dalam beberapa kesempatan, Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukito menyatakan, upaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang hak-hak mereka sebagai konsumen perlu terus dilakukan. Hasil pemetaan Indeks Keberdayaan Konsumen (IKK) Indonesia yang dilakukan Kementerian Perdagangan tahun 2016 di 13 provinsi menunjukkan,

nilai IKK Indonesia masih rendah yaitu 30,86 dari nilai maksimal 100.

"Pemetaan IKK Indonesia secara umum memperlihatkan konsumen cenderung tidak mengetahui undang-undang dan lembaga perlindungan konsumen, serta tidak mengajukan komplain ketika merasa dirugikan," ujar Mendag Enggar seperti dilansir situs harkornas.id [20 April 2017].

Hasil survei mengungkapkan bahwa 42% konsumen yang mengalami masalah tidak melakukan pengaduan. Alasan mereka beragam. Kerugian dinilai tidak besar [37%], tidak mengetahui tempat pengaduan [24%], proses dan prosedur pengaduan lama dan rumit [20%]. Ada pula yang beralasan telah mengenal baik penjual [6%] sehingga urung melakukan pengaduan.

Portal Perlindungan Konsumen

Terkait fakta demikian, menarik apa yang diupayakan pemerintah. Pada puncak peringatan Harkonas 2018, Menteri Perdagangan meluncurkan portal atau situs online www.konsumen-indonesia.go.id.

konsumen-indonesia.go.id. Dalam acara yang berlangsung di Pangkal Pinang, Bangka Belitung, 24 April 2018, Menteri Perdagangan menjelaskan, Portal Perlindungan Konsumen tersebut dibangun berdasar Peraturan Presiden Nomor 50 Tahun 2017 tentang Strategi Nasional Perlindungan Konsumen. portal didukung oleh Kementerian Perdagangan bersama 9 kementerian/lembaga lain yaitu Kementerian PU-PERA, Kementerian Perhubungan, Kementerian Kesehatan, BPOM, Kementerian Kominfo, ESDM, Bank Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan.

Mendag Enggar berharap, portal ini bisa menjadi media informasi bagi konsumen dan sarana menyalurkan keluhan ataupun pengaduan terhadap produk barang maupun jasa di berbagai sektor. Menurut Mendag, saat ini ada sejumlah sektor yang menjadi prioritas dalam Strategi Nasional Perlindungan Konsumen yaitu obat dan makanan; jasa keuangan (perbankan, asuransi, pembiayaan); jasa transportasi; listrik dan gas rumah tangga; jasa telekomunikasi (jasa telepon dasar dan akses internet); jasa layanan kesehatan; e-dagang; perumahan; barang elektronik, telematika dan kendaraan bermotor.

Melayani Sang Raja

Pembeli adalah raja! Konsumen adalah raja! Pepatah lama ini memang benar adanya tatkala produk barang dan jasa masih bersifat sederhana. Konsumen bisa dengan mudah mengenali dan memahami produk barang atau jasa yang mereka beli dan konsumsi. Sehingga, dengan mudah menyampaikan kritik dan komplain terhadap kualitas produk yang mereka terima. Namun, pada era teknologi seperti sekarang, proses produksi barang tidak lagi sederhana, melainkan cukup kompleks. Konsumen tidak bisa dengan mudah mengontrol kualitas

barang dan menyampaikan kritik serta keluhan. Pun produk layanan jasa, tidak mudah dipahami konsumen. Dalam keadaan kekurangan pengetahuan tentang produk baik barang maupun jasa, posisi konsumen sangat lemah. Pihak produsen bisa dengan gampang mempermainkan konsumen yang awam.

Selama ini kita sering mendengar aneka keluhan masyarakat terhadap produk jasa keuangan, telekomunikasi, layanan kesehatan dan produk obat-obatan. Pada era *e-commerce* saat ini tak jarang terjadi kasus penipuan terhadap konsumen. Juga, penipuan berkedok investasi. Hal itu terjadi karena konsumen tidak lagi mudah mengontrol berbagai produk tersebut.

Dalam konteks inilah peran pemerintah sangat diharapkan untuk memberdayakan konsumen. UU Perlindungan Konsumen memang sudah sejak lama ada, tetapi itu saja tidak cukup. Konsumen perlu diberdayakan, agar berpengetahuan, cerdas dalam memilih produk dan bersikap kritis. Kritisme konsumen bermanfaat tidak saja bagi konsumen sendiri, tidak hanya untuk melindungi konsumen, melainkan juga berdampak bagi perekonomian secara luas. Kritisme konsumen akan mendorong produsen untuk terus meningkatkan layanan dan kualitas produksinya. Pada gilirannya, hal itu akan meningkatkan nilai kompetitif atau daya saing usaha di berbagai sektor, sehingga akan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional.

Oleh sebab itu, kita hargai langkah-langkah pemerintah seperti menetapkan Hari Konsumen Nasional dan membangun portal perlindungan konsumen, sebagai bagian untuk memberdayakan konsumen, agar kembali sebagai raja. Ya, konsumen adalah raja!

[Winarta, wartawan, pengajar jurnalistik]

Malang Melintang di Daglu Berlabuh Juga di Bappebti



Nusa Eka
Sekretaris Bappebti

Generasi yang lahir tahun 1960-an tentu hafal lagu Satu Nusa Satu Bangsa, karena lagu itu merupakan salah satu lagu wajib yang selalu dinyanyikan di kelas maupun saat upacara sekolah. Nusa dalam bahasa Sansekerta berarti pulau. Eka artinya satu. Dua kata itu disatukan Nusa Eka menjadi sebuah nama seseorang yang kini menjabat sebagai Sekretaris Bappebti Kementerian Perdagangan.

Saat ditemui di ruang kerjanya di lantai 4 Gedung Bappebti Jalan Kramat Raya no. 172, Jakarta, Nusa Eka dengan ramah bercerita. “Ayah saya berasal dari Sumatera Barat. Ibu saya dari Kalimantan Selatan. Mereka bertemu saat kuliah di Yogyakarta. Lalu mereka menikah dan lahir anak pertama, diberinya nama Nusa Eka, yang berarti dua pulau menjadi satu. Kini, dari saya sudah lahir pula satu cucu,” ujar Nusa Eka dengan wajah ceria. Nusa Eka sendiri lahir di Padang 25 April 1961 sebagai anak pertama dari 3 bersaudara. Ayahnya Yusuf Lengah adalah seorang pegawai di

PT Pertani, sedangkan ibunya Novita Dahlia seorang hakim.

Sehari-hari pria yang tingginya 180 cm ini dipanggil Eka oleh teman-temannya. Oleh bawahan atau rekan kerjanya ia dipanggil Pak Eka. Soal panggilan tak terlalu dipermasalahkan oleh Nusa Eka. Yang penting baginya adalah terus bekerja. Lulus dari Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, Nusa Eka masuk ke Kementerian Perdagangan [dahulu Departemen Perdagangan]. Nusa Eka sebelumnya juga melamar ke Departemen Dalam Negeri dan Mahkamah Agung. Ia kemudian diterima di Departemen Dalam Negeri. Sempat bekerja sebentar di Depdagri, ternyata ia pun lulus tes dari Departemen Perdagangan. Karena di Depdagri ia akan ditempatkan di Kalimantan Timur sementara orang tuanya di Jakarta, Nusa Eka akhirnya memilih tetap tinggal di Jakarta dan ia pindah kerja dari Depdagri ke Departemen Perdagangan pada April 1987, tepat saat usianya menginjak 25

tahun.

“Pertama kali saya ditempatkan di Biro Administrasi, di bagian kelembagaan dan analisa jabatan. Setelah 2 tahun saya dipindahkan ke Sekretariat Direktorat Perdagangan Luar Negeri di bagian Perencanaan dan Program. Itu tahun 1990-an. Waktu itu Kantor Kemendag masih vertikal, artinya masih ada Kantor Wilayah Perdagangan di daerah-daerah. Nah, tugas saya ketika itu merencanakan kegiatan bidang perdagangan luar negeri untuk daerah-daerah, termasuk di dalamnya Informasi Muatan Ruang Kapal yang saat itu menjadi bagian pekerjaan orang Bappebti,” kata Nusa Eka.

Menurut Eka di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri inilah paling lama ia bertugas, yaitu antara tahun 1990 hingga 2009. Sambil bekerja ia pun mengambil gelar master di bidang Marketing di Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti. “Saya berputar-putar lama di Direktorat Perdagangan Luar Negeri, hampir 20 tahun. Saya

pernah di Direktorat Ekspor Produk Perdagangan dan Pertambangan, kemudian Direktorat Ekspor sebagai Kasi Ekspor Tanaman Pangan, kemudian ditugaskan lagi ke Direktorat Ekspor Perikanan dan Hasil Perikanan sebelum terakhir ke sebagai Direktur Produk Industri dan Pertambangan.

Nusa Eka juga pernah menjalankan tugas sebagai ITPC di Budapest dan Atase Perdagangan di Berlin, Jerman. Ketika bertugas di luar negeri ia rajin memperkenalkan masakan Indonesia dalam forum-forum perdagangan yang diselenggarakan di sana, dengan maksud memperkenalkan kekayaan kuliner khas Indonesia. Sampai kini ia masih terus menggali khasanah masakan khas tanah air. “Saya memang senang masakan, tak peduli masakan daerah manapun. Maka setiap kali saya tugas ke daerah, saya sempatkan mencari masakan khas yang terkenal enak di daerah tersebut. Saya makan di situ, walaupun bentuknya hanya warung sederhana. Tak peduli saya, yang penting masakannya enak,” kata



Trust atau kepercayaan merupakan elemen dasar agar industri ini tetap berlanjut [sustainable]. Karena itu tata kelola institusi dan business process dalam industri ini harus memberi sinyal kredibilitas bagi para pelaku pasar, dan Bappebti memiliki peran sentral untuk menjaga industri ini tetap pada koridor yang kredibel

lelaki yang dulunya pemain bola basket ini.

Setelah menjelajahi hampir semua bagian di Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, maka “terdamparlah” Nusa Eka ke Bappebti, “Ini baru saya ke Bappebi, Maret 2017. Saya harus banyak belajar, terutama tentang Perdagangan Berjangka Komoditi atau PBK. Jadi sambil bekerja, saya terus belajar. Diantara 3 pilar yakni SRG, PLK dan PBK, yang agak rumit itu PBK. Mungkin karena saya masih baru ya. Kalau persoalan perdagangan luar negeri saya sudah hapal,” kata pria yang masih suka main tenis ini.

Sebagai sekretaris Bappebti, posisi Nusa Eka ibarat motor penggerak agar organisasi terus berlari kencang. Untuk itu ia harus selalu rajin berkoordinasi dengan bidang-bidang lain. Nusa Eka mengatakan ia tak segan berjalan menemui dan menyapa semua staf yang ada di Bappebti. “Intinya adalah interaksi, sinkronisasi, harmonisasi. Saya sering jalan ke semua bagian. Kami komunikasi

dengan semua teman-teman. Sebagai sekretaris kan saya harus luwes, karena sekretaris sifatnya melayani semua unit yang ada, baik masalah keuangan, program dan lain-lain. Kita juga menjembatani pimpinan dengan biro-biro. Berinteraksi dengan eksternal [bursa, pialang] dan juga kalangan internal Bappebti,” jelas Nusa Eka.

Tentang Bappebti Nusa Eka yang suka olahraga jogging ini menjelaskan, “Tantangan utama Bappebti adalah tetap menjaga kepercayaan para pelaku pasar di tiga pilar, yaitu Pasar Lelang Komoditi, Sistem Resi Gudang [SRG] dan Perdagangan Berjangka Komoditi [PBK]. Kita menyadari bahwa trust atau kepercayaan merupakan elemen dasar agar industri ini tetap berlanjut [sustainable]. Karena itu tata kelola institusi dan business process dalam industri ini harus memberi sinyal kredibilitas bagi para pelaku pasar, dan Bappebti memiliki peran sentral untuk menjaga industri ini tetap pada koridor yang kredibel”.



Jadi Nasabah SPA Harus Cerdas



#KOMIKITA



Layanan SMS Center BAPPEBTI
Jika Anda mempunyai informasi atau pertanyaan mengenai kegiatan Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), Sistem Resi Gudang (SRG) dan Pasar Lelang Komoditi (PLK) sesuai dengan tupoksi Bappebti Kementerian Perdagangan dapat disampaikan melalui SMS 0811-1109-901. Dengan format NAMA (spasi) DOMISILI (spasi) ALAMAT EMAIL (spasi) PESAN
*SMS dikenakan biaya reguler (tergantung dari masing-masing provider telepon)

Matsasih (Jakarta) 08156-632139xxx

Pertanyaan:

Membaca tentang Sistem Resi Gudang (SRG) saya sangat tertarik, karena sistem ini sangat menolong petani dalam mendapatkan modal kerja pada saat mereka sangat membutuhkannya ketika memulai masa tanam kembali. Apakah SRG ini terbatas hanya untuk petani padi? Terima kasih.

Toni, Subang

Jawab:

Bapak Matsasih Yth, Sistem Resi Gudang (SRG) sudah berjalan sejak tahun 2008, jadi sudah berjalan selama 11 tahun. Kami bersyukur sistem ini sampai hari ini masih terus berlangsung dan makin berkembang. SRG memang dimaksudkan untuk menolong para petani agar mereka bisa memperoleh modal kerja dengan menjaminkan hasil panen mereka manakala saat itu harga komoditi sedang kurang baik.

Komoditi yang disimpan dalam sistem SRG terus bertambah, dan belakangan ini kami sedang mengembangkan SRG untuk komoditi bawang merah. Gudang SRG bawang merah ini sedang dibangun di Brebes, Jawa Tengah, dengan teknologi khusus yang memungkinkan bawang merah tahan lama dengan mutu yang tetap terjaga selama berbulan-bulan lamanya.

Manfaatkan Sistem Resi Gudang (SRG)



Mendapatkan harga lebih baik dengan tunda jual (komoditi) disimpan pada waktu harga rendah/panen raya dan dijual pada waktu harga menjadi lebih baik



Kepastian kualitas dan kuantitas atas barang yang disimpan



Mendapatkan pembayaran dengan cara tepat dan mudah



Mendorong berusaha secara berkelompok sehingga meningkatkan efisiensi dan posisi tawar

Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti)
www.bappebti.go.id

PERINGATAN PEMERINTAH



**Mau terjun ke Bisnis
Berjangka Komoditi? Bagus
Anda bisa untung besar
dalam waktu singkat**



**Tapi ingat!!!
Bisnis ini juga resiko tinggi.
Anda bisa rugi dalam
hitungan detik**

**PELAJARILAH DENGAN SEKSAMA SEMUA RISIKO YANG DIHADAPI,
MEKANISME TRANSAKSI, SUBJEK KONTRAK BERJANGKA,
TEKNIK ANALISA DAN PERATURAN PERDAGANGAN
(*TRADING RULES*) SEBELUM MENENTUKAN PILIHAN ANDA**

Dipersembahkan oleh:
Bappebti Kementerian Perdagangan RI